

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Perwal Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi belum terimplementasikan sebagaimana dengan yang diatur di dalam Perwal Nomor 25 Tahun 2016. Temuan di lapangan memperlihatkan kondisi yang berbeda. Dibuktikan dengan temuan di lapangan, yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi belum berjalan secara berjenjang pada tahapan mau, mampu, dan maju. Permasalahan utama justru berada pada tahapan awal (mau), yang mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran aktor terhadap kebijakan. Minimnya sosialisasi menyebabkan pelaksana di tingkat sekolah dan orang tua murid belum memahami secara memadai tujuan, indikator, serta peran masing-masing dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kondisi ini menghambat pergerakan ke tahapan selanjutnya.
2. Pemahaman kebijakan yang belum terbentuk karena penyebaran informasi dan pembinaan yang masih sangat terbatas. Substansi Perwal dan indikator Sekolah Ramah anak belum benar-benar diketahui dan dipahami oleh sekolah maupun

orang tua. Hanya dipahami oleh DPPP dan Dinas Pendidikan yang bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dengan SDM dan anggaran yang sangat terbatas. Sehingga penyebaran informasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dibuktikan dengan hanya 28,75% sekolah berlabel Sekolah Ramah Anak.

3. Sekolah dengan label dan plang SRA belum menjamin sudah menjalani Perwal tentang Sekolah Ramah Anak. Plang tersebut menandakan bahwa sekolah telah berkomitmen namun temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah masih belum memahami perannya. Hanya seperti penamaan saja tanpa didukung dengan kesesuaian pelaksanaannya.
4. Implementasi yang sangat bergantung kepada masing-masing sekolah. Sekolah Ramah Anak sangat ditentukan kepada komitmen sekolah dimana tidak ada dukungan apapun dari DPPP maupun Dinas Pendidikan untuk keberjalanan kebijakan. Belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dan tidak mengajak orang tua sebagai implementor dari Sekolah Ramah Anak. Begitu pula dengan ketiadaan monitoring hingga evaluasi dari dinas kepada sekolah. Sehingga sangat bergantung kepada laporan sekolah kepada Dinas yang mana menjadi celah adanya perbedaan informasi antar implementor.

4.1.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan Perwal Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi

A. Faktor Penghambat

Implementasi Sekolah Ramah Anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang seharusnya dapat mendukung jalannya kebijakan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi **dipengaruhi oleh beberapa hambatan yang berdampak langsung pada proses implementasi, yaitu :**

1. Komunikasi dan Sumber daya yang terbatas

Komunikasi antara instansi pemerintah dan sekolah tidak berjalan secara konsisten. Terjadi ketimpangan informasi menyebabkan pemahaman dan tindakan pelaksana berbeda-beda, sehingga kebijakan berjalan tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM dan anggaran sehingga pembinaan hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun dengan jumlah peserta terbatas. Berdampak juga kepada pemahaman para implementor. Selanjutnya belum semua sekolah memiliki keterbatasan fasilitas, seperti tidak adanya ruang konseling dan minimnya sarana bermain.

2. Tidak adanya Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga menjadi hambatan karena belum adanya SOP secara teknis dan pembagian tugas yang jelas di sekolah berlabel Sekolah Ramah Anak. Belum adanya pelibatan orang tua yang seharusnya menjadi implementor dan memiliki peran di rumah untuk mendukung Sekolah Ramah Anak. Sehingga ketiadaan pedoman pelaksanaan membuat sekolah tidak memiliki acuan ketika

ingin menjalankan Sekolah Ramah Anak. Akibatnya, sekolah bergerak berdasarkan inisiatif masing-masing tanpa pegangan yang pasti.

B. Faktor Pendorong

Implementasi Sekolah Ramah Anak **didukung oleh** :

1. Disposisi Pelaksana

Seluruh implementor memiliki sikap yang positif terhadap upaya perlindungan anak, ditemukan bahwa sikap dari para implementor sangat mendukung adanya upaya pemenuhan hak anak di sekolah melalui Sekolah Ramah Anak. Dibuktikan dengan adanya permintaan pembinaan mandiri tentang Sekolah Ramah Anak yang datang dari beberapa sekolah kepada DPPPA. Begitu pula dengan orang tua yang tidak memahami perannya namun tetap berusaha mendidik anaknya dengan konsep ramah anak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk memaksimalkan implementasi Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi, peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan pemerataan komunikasi kebijakan.** Penyebaran informasi mengenai Sekolah Ramah Anak perlu dilakukan secara lebih merata agar seluruh sekolah dan orang tua memiliki pemahaman yang sama. Komunikasi dapat diperluas melalui media digital seperti panduan singkat,

infografik, video penjelasan, atau modul yang mudah diakses. Upaya ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sosialisasi tatap muka yang selama ini hanya dapat menjangkau sebagian kecil sekolah.

2. **Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi.** Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan implementasi Sekolah Ramah Anak tidak hanya bergantung pada inisiatif sekolah. Mekanisme monitoring dapat dilakukan secara sederhana, seperti laporan rutin setiap semester. Evaluasi juga dapat dilakukan secara teratur dimana akan membantu mendeteksi kendala implementasi dan dapat memastikan label SRA yang diberikan tidak hanya menjadi status administratif tetapi benar-benar diikuti oleh pelaksanaan di lapangan.
3. **Memperkuat koordinasi antar implementor.** Koordinasi antara pihak yang terlibat perlu diperkuat agar alur komunikasi tidak terputus dan terjadi perbedaan persepsi serta pemahaman antar implementor. Koordinasi yang baik akan mengurangi kesenjangan informasi antara DPPPA, Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Orang tua.
4. **Membuat pembagian peran dan pedoman teknis.** Pembagian peran antar implementor perlu dijelaskan melalui pedoman teknis sederhana yang mudah diterapkan sekolah. Pedoman dapat memuat alur pelaksanaan SRA, tugas dasar setiap pihak, serta contoh penerapan indikator Sekolah Ramah Anak. Penjelasan perlu didapatkan oleh setiap implementor agar dapat berpartisipasi untuk membangun Sekolah Ramah Anak secara merata.